



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI BAGI PENGUATAN KAPASITAS BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (BUJK) dan PENGEMBANGAN POTENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TKK) LOKAL



DASAR HUKUM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



UU 23 /2014 TENTANG PEMDA

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi habis dalam tingkatan Pemerintahan (Pusat dan Daerah Provinsi/Kab/kota;

Sub Urusan Jasa Konstruksi masuk dalam Urusan Pemerintahan Daerah Bidang PU

UU 2 / 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Prov/Kab/Kota pada **bidang Jasa Konstruksi yang telah diselaraskan** dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

UU 6/2023 TENTANG CIPTA KERJA

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan **kemudahan berusaha**, dan percepatan PSN investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN

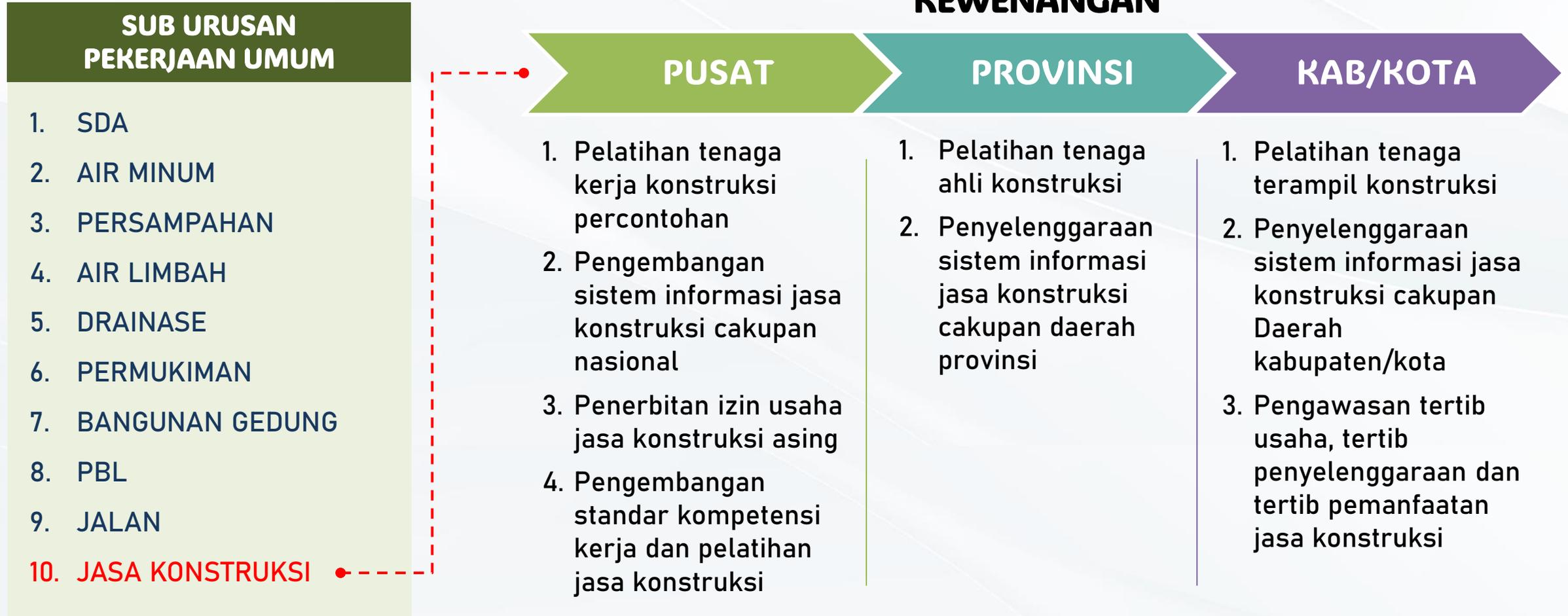
PP 14/2021 TENTANG PER PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG JAKON

Peraturan Pelaksanaan terkait Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang Jasa Konstruksi





KEWENANGAN SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI UU 23/2014



INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI

Permendagri 18/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pp 13/2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PROVINSI - 14 IKK

1. Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih;
3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli;
4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yg aktif dengan data yg termutakhir;
5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi yg bersumber dari APBD;
6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi yg bersumber dari APBN;
7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi yg bersumber dari pendanaan lainnya;
8. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi;
9. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja;
10. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih yg dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli;
11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yg tersertifikasi ahli;
12. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya;
13. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya;
14. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi

**IKK
OUTCOME**



Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

KABUPATEN/KOTA - 25 IKK

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, tenaga kerja konstruksi yang terlatih tersertifikas
2. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang aktif dengan data yang termutakhir
3. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang bersumber dari APBD, APBN, pendanaan lainnya
4. (4-9) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi, data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi, pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya
10. (10-17) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis, badan usaha yang mendapatkan pembinaan, pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui, hasil pengawasan ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi, kecelakaan konstruksi pada proyek, hasil pengawasan ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
18. (18-21) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN, usaha perseorangan yang memiliki TDUP, badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek, badan usaha yang mendapatkan pembinaan
22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksihinggaan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

**IKK
OUTCOME**



Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

PRIORITAS PENGGUNAAN TENAGA KONSTRUKSI DALAM NEGERI/ LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PP 22/2020 TENTANG PERATURAN
PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG
JASA KONSTRUKSI
(Pasal 46)



- Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan**
- memenuhi asas nyata dalam penyelenggaraan Layanan Usaha Jakon;
 - memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
 - menggunakan bentuk usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kemampuan usaha yang sesuai, kompetensi dan kinerja yang baik;
 - menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
 - memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
 - mengutamakan penggunaan sumber daya Konstruksi dalam negeri;**
 - menerapkan inovasi teknologi dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal;** dan
 - mempertimbangkan aspek resiko di dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



PROFIL KELEMBAGAAN PENGAMPU JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



No.	Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Setara Es.3	Setara Es.4	Non Struktural (haNYA TUSI)	Belum Ada
	KALIMANTAN TIMUR	1			
1	Kabupaten Berau		1		
2	Kabupaten Kutai Barat	1			
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	1			
4	Kabupaten Kutai Timur	1			
5	Kabupaten Mahakam Ulu	1			
6	Kabupaten Paser	1			
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	1			
8	Kota Balikpapan		1		
9	Kota Bontang	1			
10	Kota Samarinda	1			
	TOTAL	8	2	0	0

Sumber:

1. Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR (2024)
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (2024)



KETERSEDIAAN TENAGA JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Data Tahun 2023

KEBUTUHAN KEBIJAKAN PEMBINAAN BUJK DAN KETERSEDIAAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI YANG TERLATIH DAN TERSERTIFIKASI

Data BUJK se-Provinsi Kalimantan Timur

JASA KONSULTAN	404
KECIL (K)	388
MENENGAH (M)	12
BESAR (B)	2
SPECIALIS	2
KONTRAKTOR	3,498
KECIL (K)	3,032
MENENGAH (M)	280
BESAR (B)	41
SPECIALIS	145
PENYEDIA	3,902

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Ketersediaan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Terlatih Dan Tersertifikasi, serta BUJK yang terbina dengan baik menjamin kualitas infrastruktur yang terbangun di Provinsi Kalimantan Timur.



MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH



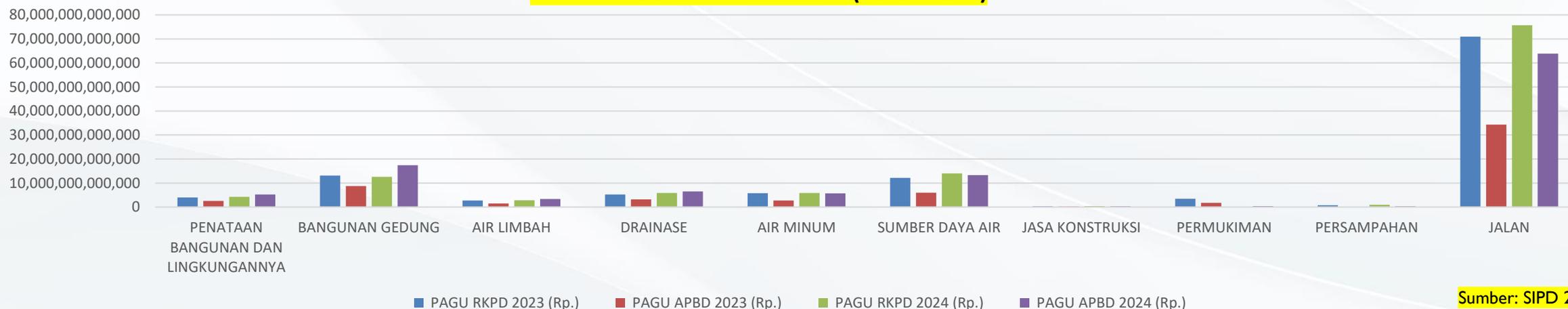
DASAR HUKUM:

- PP 14/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- PermenPUPR 1/2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

- Sub Kegiatan pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317/2023 terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUJK di Tingkat Provinsi: A) 1.03.11.1.03.0004: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; B) 1.03.11.1.03.0005: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; C) 1.03.11.1.03.0006: Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi; D) 1.03.11.1.03.0007: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317/2023 terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUJK di Tingkat Kab/Kota: A) 1.03.11.2.04.0004: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota; B) 1.03.11.2.04.0005: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota; C) 1.03.11.2.04.0006: Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi; D) 1.03.11.2.04.0007: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota; E) 1.03.11.2.04.0008: Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

RKPD DAN APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM SELURUH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 dan 2024

TREND PAGU RKPD DAN APBD (2023– 2024)



Sumber: SIPD 2024

NO	SUB URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2023		TAHUN ANGGARAN 2024	
		RKPD	APBD	RKPD	APBD
1	JALAN	70,984,902,803,143	34,316,339,815,719	75,720,731,653,507	63,916,780,166,873
2	BANGUNAN GEDUNG	13,097,634,598,673	8,719,195,066,324	12,559,885,320,077	17,444,032,911,228
3	SUMBER DAYA AIR	12,143,273,927,511	5,908,054,741,578	13,981,325,543,358	13,318,187,897,901
4	DRAINASE	5,258,398,408,175	3,148,155,588,305	5,880,461,785,846	6,472,384,410,206
5	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,938,819,059,964	2,592,657,591,438	4,291,607,614,340	5,254,552,491,277
6	AIR MINUM	5,737,067,411,120	2,701,331,288,939	5,850,966,269,417	5,646,456,041,982
7	AIR LIMBAH	2,730,330,563,644	1,478,169,377,300	2,860,152,387,809	3,382,197,528,794
8	PERMUKIMAN	3,466,967,591,577	1,746,289,842,053	-	357,100,061,206
9	PERSAMPAHAN	795,507,300,170	1,408,260,000	980,517,134,657	340,135,952,474
10	JASA KONSTRUKSI	309,124,860,871	181,482,817,630	391,675,868,805	288,245,033,292
TOTAL		118,462,026,524,848	60,793,084,389,286	122,517,323,577,816	116,420,072,495,233

PAGU SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DAN KAB/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR (RKPD VS APBD 2024)

No	Daerah	RKPD	APBD	Selisih	Deviasi
1	Provinsi Kalimantan Timur	23,175,296,800	19,026,904,400	4,148,392,400	-18%
2	Kab. Berau	880,000,000	3,264,999,500	2,384,999,500	271%
3	Kab. Kutai Barat	3,047,500,000	3,526,732,426	479,232,426	16%
4	Kab. Kutai Kartanegara	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0%
5	Kab. Kutai Timur	5,150,000,000	7,050,000,000	1,900,000,000	37%
6	Kab. Mahakam Ulu	1,717,439,200	3,170,490,500	1,453,051,300	85%
7	Kab. Paser	353,200,000	1,514,136,200	1,160,936,200	329%
8	Kab. Penajam Paser Utara	950,000,000	3,001,240,668	2,051,240,668	216%
9	Kota Balikpapan	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0%
10	Kota Bontang	1,170,000,000	4,669,986,982	3,499,986,982	299%
11	Kota Samarinda	2,285,000,000	3,100,000,000	815,000,000	36%
	TOTAL	44,328,436,000	53,924,490,676	9,596,054,676	

Sumber: SIPD 2024

- ✓ Total RKPD bidang Jasa Konstruksi di seluruh Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Timur yang telah terintegrasi ke dalam SIPD TA 2024 sebesar Rp. 44,328,436,000,-
- ✓ Total APBD bidang Jasa Konstruksi di seluruh Provinsi Kalimantan Timur yang telah integrasi ke dalam SIPD TA 2024 sebesar Rp. 53,924,490,676,-
- ✓ Total Selisih antara RKPD dan APBD TA 2024 seluruh Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 9,596,054,676,-

REKOMENDASI

1

Pengembangan Kapasitas BUIK dan TKK Lokal diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi, untuk mewujudkan BUIK dan TKK Lokal yang berkualitas

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memperkuat partisipasi Masyarakat dalam penguatan kapasitas Masyarakat Jasa Konstruksi

2

3

Penyusunan Kebijakan terkait Jasa Konstruksi diwujudkan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas BUIK dan TKK Lokal guna memperkuat daya saing daerah



TERIMA KASIH





NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI

KODE				NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11	1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1	03	11	1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE				NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan
1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Terpantau dan Terevaluasinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	
1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE				NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun